

**EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN
WISATA ALAM PULAU SATONDA DI DESA NANGA MIRO
KECEMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU**

SKRIPSI



NAMA : M. ADIYANSYAH

NIM : 105950060615

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2022

Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Satonda Di

Desa Nanga Miro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

M. Adiyansyah

105950060615

SKRIPSI

**Salah satu sarat untuk memperoleh gelar sarjana kehutanan
strata satu (S-1)**

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

07/02/2022

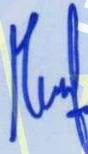
1 cap
Smb. Alumni

R/0016/HUT/220
ADI
e'

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Taman Wisata Alam
Pulau Satonda Di Desa Nanga Miro Kecamatan Pekat
Kabupaten Dompu
Nama : **M.ADIYANSYAH**
Nim : 105950060615
Jurusan : Kehutanan
Fakultas : Pertanian

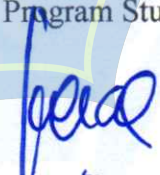
Disetujui Oleh

Pembimbing I,  Muthmainnah S. Hut., M. Hut
NIDN: 0920018801

Pembimbing II,  Ir. M. Daud, S. Hut., M. Si, IPM, C.EIA
NIDN: 0929118502

Mengetahui oleh

Dekan fakultas pertanian  Dr. Ir. Hj. Andi Khaeriyah., M. Pd
NIDN: 0926036803

Ketua Program Studi  Dr. Hikmah, S. Hut, M. si, IPM
NIDN: 0011077101

HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul Penelitian : Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Taman Wisata Alam
Pulau Satonda Di Desa Nanga Miro Kecamatan Pekat
Kabupaten Dompu

Nama Mahasiswa : M.Adiyansyah

No. Stambuk/Nim : 105950060615

Fakultas : Pertanian

Jurusan : Kehutanan

SUSUNAN TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Muthmainnah, S.Hut., M.Hut

Pembimbing I

Ir. M. Daud, S.Hut., M.Si, IPM, C.EIA

Pembimbing II

Dr.Ir.Hajawa, M.P

Penguji I

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM

Penguji II

Tanggal Kelulusan : 25 Januari 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi dengan Management Effectiveness Tracking Tools (METT) di Taman Wisata Alam Pulau Satonda (Studi Kasus: Taman Wisata Alam Pulau Satonda Di Desa Nanga Miro Kec. Pekat Kab. Dompu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bapak Ir.M.Daud S.Hut.,M.si.,IPM selaku pembimbing 2 yang telah membimbing dan memberikan berbagai masukan kepada penulis dan ucapan terimakasih juga kepada ibu Mutmainnah S.Hut.,M.Hut selaku pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis bapak alm.H.A.Hadi dan ibu Nurma mengajari saya bagaimana itu kerasnya kehidupan, semangat, dan, serta doa-doa selama ini yang tanpa henti ia lantunkan untuk anak-anaknya. Dan terikasih pula untuk kedua Kakak saya Nur Hardianti, Is Nuryanti dan adik saya M.Subhan yang telah meluangkan waktunya untuk tetap memberi dukungan, semangat serta doa untuk adiknya ini.

Disamping itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini. masyarakat desa Nanga Miro, Labuan.Kenang. Kepada semua staf pengajar dan pegawai di Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, serta semua rekan mahasiswa yang tak dapat

disebutkan satu per satu disini yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Makassar, Maret 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hutan Konservasi.....	5
2.2. Evaluasi.....	6
2.3. Taman Wisata Alam	7
2.3.2. Fungsi Dan Manfaat Taman Wisata Alam.....	8
2.4. Taman Wisata Alam Pulau Satonda	11
2.5. Management Effectiveness Tracking Tools (METT).....	13
2.6. Kerangka Pikir	16
BAB III METODE PENELITIAN	

3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	17
3.2. Teknik Pengambilan Sampel.....	17
3.3. Teknik Pengambilan Data	17
3.4. Jenis Data.....	18
3.5. Teknik Analisis Data	18
3.6. Definisi Operasional.....	19
BAB IV KEADAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum TWA Pulau Satonda	21
4.2. Visi Dan Misi BKSDA NTB.....	24
4.3. Struktur Organisasi.....	26
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Penilaian Efektivitas Pengelolaan	27
5.1.1. Konteks	28
5.1.2. Perencanaan.....	29
5.1.3. Masukan (Input).....	30
5.1.4. Proses (Process).....	31
5.1.5. Pengeluaran (Output).....	32
5.1.6. Hasil Akhir (Outcome).....	33
5.2. Rekapitulasi METT TWA Pulau Satonda	34
5.3. Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal.....	34
BAB VI PENUTUP	
6.1. kesimpulan	38
6.2. Saran	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Penjelasan ringkas keenam aspek METT.....	13
2.	Penjelasan ringkas keenam aspek METT.....	19
3.	Kategori tingkat efektivitas.....	20
4.	Penilaian Efektivitas pengelolaan TWA Pulau Satonda.....	26
5.	Fasilitas dan aktivitas kegiatan di TWA Pulau Satonda.....	31
6.	Rekapitulasi Nilai METT pada TWA Pulau Satonda.....	33



DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Kerangka piki penelitian.....	15
2.	Struktur Organisasi Balai KSDA NTB SEKSI KONSERVASI WILAYAH III BIMA-DOMPU.	24
3.	Peta lokasi TWA Pulau Satonda.....	
4.	Peta penataan blok.....	
5.	Dokumentasi.....	



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekowisata kawasan hutan tropika. Kawasan hutan yang dapat berfungsi sebagai kawasan wisata berbasis lingkungan adalah Kawasan Pelestarian Alam (taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam), Kawasan Suaka Alam (suaka margasatwa dan cagar alam), hutan lindung melalui kegiatan wisata alam terbatas, serta hutan produksi yang berfungsi sebagai wana wisata. Kawasan – kawasan tersebut merupakan destinasi yang diminati oleh wisatawan, karena memiliki keanekaragaman flora dan fauna, fenomena alam yang indah, objek budaya dan sejarah, serta kehidupan masyarakat lokal yang unik. Keseluruhan objek daya tarik wisata ini merupakan sumberdaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus sebagai sarana pendidikan dan pelestarian lingkungan (Fandelli, 2005).

Salah satu kawasan konservasi yang memiliki potensi ekowisata yaitu Taman wisata alam Pulau Satonda terkenal dengan keunikannya, dikarenakan keunikan tersebut berdasar Surat Keputusan. Menteri Kehutanan Nomor : 22/Kpts-VI/1998 tanggal 7 Januari 1998, Pulau Satonda dan Perairan disekitarnya seluas 2.600 Ha terdiri dari daratan (453,70 Ha) dan luas perairan (2146,3 Ha). Secara administratif berada di wilayah Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dan mencakup batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut, sebelah utara dibatasi perairan satonda bagian utara, sebelah timur dibatasi Desa Labuhan Kenanga, sebelah selatan dibatasi perairan Selat Satonda dan sebelah barat dibatasi perairan Selat Belahan bagian utara.

Letaknya yang strategis di jalur laut wisata Pulau Bali, Pulau Moyo dan Pulau Komodo serta potensi sumber daya alam hayati dan keindahan panorama alam yang unik Pulau Satonda sangat berpotensi dikembangkan sebagai obyek wisata alam yang dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupannya (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, 2016).

Taman Wisata Alam Pulau Satonda memiliki beberapa obyek dan kegiatan wisata alam yang tersedia di pulau Satonda yaitu danau, pasir putih, terumbu karang, ikan hias, dan perbukitan yang cantik dengan pemandangan danau di tengah pulau dan pantai. Disamping itu, beberapa kegiatan wisata yang biasa dilakukan antara lain *snorkeling*, *diving*, *jungle tracking*, berjemur dan pengamatan satwa.

Taman Wisata Alam Pulau Satonda memiliki potensi yang mendukung untuk objek wisata yaitu perairan taman wisata alam Pulau Satonda. Keadaan perairan di Taman Wisata Alam Pulau Satonda mempunyai dasar perairan yang landai dengan *patch reef* terutama di bagian selatan dan timur, serta curam pada bagian utara dan bagian barat pulau. Wilayah dasar perairan yang dangkal umumnya ditumbuhi berbagai jenis koloni karang dengan pola penyebaran yang bervariasi antara mengelompok dan *patch reef coral* serta merupakan habitat berbagai biota karang (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, 2016). Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukanlah penelitian dengan judul Evaluasi efektivitas pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Satonda di Desa Nanga Miro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Satonda di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Satonda di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai bahan informasi untuk mrngrtahui seberapa evektif sistem pengelolaan yang di gunakan oleh pihak Taman Wisata Alam Pulau Satonda di lihat dari banyaknya potensi-potensi yang bisa untuk di kembangkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Konservasi

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. sedangkan Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi (Pasal 1 angka 2 UU No.5 Th. 1990).

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.(Pasal 1 angka 2 UU No.5 Th. 1990).

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

3. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan Konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Tiap negara mempunyai kategori sendiri untuk penetapan kawasan yang dilindungi, dimana masing-masing negara memiliki tujuan dan perlakuan yang mungkin berbeda-beda. Namun, di tingkat internasional dinaungi oleh WCPA (World Commission on Protected Areas) yang dulunya bernama CNPPA (Commission on National Parks and Protected Areas) yaitu sebuah komisi dibawah IUCN (The World Conservation Union) yang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan konservasi di dunia, baik untuk kawasan darat maupun perairan (Kemenhut, 2013).

Istilah hutan konservasi merujuk pada suatu kawasan hutan yang diproteksi atau dilindungi. Proteksi atau perlindungan tersebut bertujuan untuk melestarikan hutan dan kehidupan yang ada di dalamnya agar bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Hutan konservasi merupakan hutan milik negara yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengertian hutan konservasi menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah sebagai berikut: Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang

mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Adia, 2011).

2.2 Evaluasi

Evaluasi sangat dibutuhkan didalam berbagai bidang kehidupan manusia sehingga meningkatkan efektivitas serta juga produktivitas, baik itu dalam lingkup individu, kelompok, atau juga lingkungan kerja. Beberapa definisi dan pengertian Evaluasi, sebagai berikut:

1. Menurut Dimiyati & Mudjiono (2006), evaluasi dinilai sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.
2. Stutflebeam yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul (2010), menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.
3. Suchman yang dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul (2010), evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis, terencana dan dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program

itu selesai untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program untuk memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

2.3 Taman Wisata Alam

Taman Wisata Alam menurut UU No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Wisata dalam bahasa inggris disebut *tour* yang secara etimologi berasal dari kata *torah* (ibrani) yang berarti belajar, *tornus* (bahasa latin) yang berarti alat untuk membuat lingkaran, dan dalam bahasa prancis kuno *tour* yang berarti mengelilingi sirkuit. Pada umumnya orang memberikan perbedaan kata wisata dan rekreasi, wisata adalah sebuah perjalanan namun tidak semua perjalanan adalah wisata (Suyitno, 2001)

Taman Wisata Alam atau yang biasa disingkat TWA ini adalah wilayah konservasi yang memiliki peruntukan sebagai pariwisata maupun sarana rekreasi. Taman ini biasanya terletak di dalam wilayah konservasi sehingga dalam pengelolaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip konservasi dan perlindungan alam. Definisi Taman Wisata Alam (TWA) menurut peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan pelestarian alam yang lain selain Taman Wisata Alam yaitu Taman Nasional dan Taman Hutan Raya. Ketiganya termasuk ke dalam wilayah konservasi yang harus dilindungi. Tempat ini memiliki keindahan alam dengan keanekaragaman yang harus tetap dijaga.

Keanekaragaman tersebut tidak hanya digunakan sebagai sarana rekreasi, tapi juga untuk melestarikan flora dan fauna. Oleh karena itu, Taman Wisata Alam tetap harus memiliki prinsip konservasi dan perlindungan alam sehingga flora dan fauna langka tetap lestari keberadaannya. Tidak hanya di daratan saja, Taman Wisata Alam juga dapat berlokasi di lautan seperti tempat yang memiliki keanekaragaman terumbu karang dan hewan lautnya. Ekosistem lainnya yang mungkin termasuk ke dalam Taman Wisata Alam adalah ekosistem danau, ekosistem padang rumput, dan lain sebagainya (Ananda RS, 2019).

Taman wisata alam adalah suatu kawasan pelestarian alam yang di gunakan sebagai obyek pariwisata dan rekreasi alam yang memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik itu dalam bentuk alami maupun perpaduan hasil buatan manusia (Arief, 2001).

2.3.2 Fungsi Dan Manfaat Taman Wisata Alam

Wilayah konservasi Taman Wisata Alam secara garis memiliki fungsi dan manfaat sebagai tempat pelestarian dan ekowisata. Lokasi yang mempunyai ekosistem alami ini dapat mendukung sektor pariwisata, melindungi sistem kehidupan daerah sekitarnya, serta sebagai sarana pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. (Rimbakita.com, 2019)

Menurut Rimbakita.com, 2019 Meskipun kawasan Taman Wisata Alam juga berupa kawasan hutan, namun memiliki manfaat dan tujuan yang berbeda dari hutan pada umumnya. Berikut ini adalah manfaat Taman Wisata Alam yang wajib dikelola secara lestari, antara lain:

1. Rekreasi dan Wisata

Taman Wisata Alam adalah kawasan yang tepat untuk berekreasi dan berwisata alam. Sebut saja kawasan obyek Taman Wisata Alam Grojogan Sewu, Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Taman Wisata Alam Telaga Bodas dan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan di akhir pekan.

Berlibur ke tempat wisata alam sekaligus akan mengajarkan diri kita dan anak-anak untuk terus melestarikan alam dan menjaga lingkungan.

2. Pendidikan

Berkunjung ke lokasi Taman Wisata Alam dapat menjadi sarana edukasi bagi semua usia. Kita dapat belajar mengenai berbagai jenis pohon, tumbuhan, serta keragaman hewan. Kawasan Taman Wisata Alam umumnya juga menyediakan arena outbond yang dapat dimanfaatkan untuk mengasah softskill, kerjasama, kepemimpinan serta kemandirian.

Taman Wisata Alam merupakan kawasan tujuan bagi organisasi atau komunitas untuk mengadakan silaturahmi dalam bentuk acara gathering untuk mempererat hubungan kebersamaan.

3. Ilmu Pengetahuan dan Penelitian

Taman Wisata Alam adalah laboratorium alami dan menjadi koleksi biologis dalam bidang kehutanan. Berbagai hal dapat diteliti di tempat ini, mulai dari flora, fauna, ekosistem, serta hubungan rantai makanan di dalam hutan. Penelitian yang dilakukan tersebut nantinya akan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan.

4. Pelestarian Budaya

Di wilayah konsercasi Taman Wisata Alam biasanya juga menjadi lokasi hidupnya masyarakat adat setempat. Kekayaan adat dan kebudayaan masyarakat sekitar Taman Wisata Alam juga dapat menjadi daya tarik bagi para pengunjung.

Masyarakat tradisional disekitar hutan umumnya masih menganut kebudayaan leluhur mereka, seperti upacara adat yang memegang prinsip selaras dengan alam dan lingkungan.

2.4 Taman Wisata Alam Pulau Satonda

Taman wisata alam Pulau Satonda memang unik, dikarenakan keunikannya tersebut berdasar SK. Menteri Kehutanan Nomor : 22/Kpts-VI/1998 tanggal 7 Januari 1998, Pulau Satonda dan Perairan disekitarnya seluas 2.600 Ha terdiri dari daratan (453,70 Ha) dan luas perairan (2146,3 Ha). Secara administratif berada di wilayah Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dan mencakup batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut, sebelah utara dibatasi perairan satonda bagian utara, sebelah timur dibatasi Desa Labuhan Kenanga, sebelah selatan dibatasi perairan Selat Satonda dan sebelah barat dibatasi perairan Selat Belahan bagian utara.

Letaknya yang strategis di jalur laut wisata Pulau Bali, Pulau Moyo dan Pulau Komodo serta potensi sumber daya alam hayati dan keindahan panorama alam yang unik Pulau Satonda sangat berpotensi dikembangkan sebagai obyek wisata alam yang dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupannya (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, 2016).

Bicara mengenai Legenda yang menyelimuti Pulau Satonda, berikut kisahnya:

Dahulu kala saat dataran Nusa Tenggara masih menyatu, di tanah Dompu terdapat seorang raja Tambora yang berniat melakukan perjalanan menuju tanah Sumatera untuk mencari pasangan hidup. Di tengah perjalanan tak jauh dari Dompu ia berhenti untuk istirahat dan bertemu seorang wanita cantik jelita. Sang raja jatuh hati dan berkeinginan mempersunting untuk dijadikan istrinya.

Saat menceritakan siapa dirinya dan bagaimana ia bisa menjadi seorang raja Tambora, wanita cantik jelita tersebut menangis dan memberitahukan bahwa dirinya adalah ibunya yang terpisah oleh bencana alam dengan Satonda (Raja) ketika ia masih kanak-kanak, dan ia tidak memperholehkan sang Raja mempersunting dirinya.

Sang raja marah dan tidak mempercayai perkataan wanita cantik jelita tersebut, dan ia tetap berkeinginan menikahinya. Tiba – tiba awan hitam datang bergulung gulung disusul sambaran petir. Bumi berguncang keras, gunung Tambora meledak dengan kuatnya, guncangan bumi menimbulkan tsunami besar dan memisahkan daratan menjadi pulau-pulau kecil. Rupanya TUHAN murka tidak merestui keinginan sang Raja yang bersikukuh ingin mempersunting wanita cantik jelita tersebut yang ternyata adalah ibu kandungnya.

Tak jelas bagaimana nasib wanita jelita itu pasca bencana alam, namun sang Raja selamat terdampar dipulau kecil dan setiap hari waktunya habis oleh sesal tangis. Tetes air matanya terus mengalir bercampur genangan air di cekungan pulau yang lama kelamaan menjadi danau air asin, sesuai nama sang

Raja danau di pulau kecil tersebut kemudian diberi nama danau air asin Satonda, demikian secarik Legenda danau Satonda sebagaimana diceritakan Abdul haris dalam bukunya Legenda Danau Satonda (Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, 2016).

2.5 Management Effectiveness Tracking Tools (METT)

METT (*Management Effectiveness Tracking Tools*): Salah Satu Metode Dalam Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Oleh: Dhany Triadi, S.Hut* Metode METT (*Management Effectiveness Tracking Tools*) merupakan salah satu metode untuk mengukur efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang dikembangkan oleh WWF dan Worldbank. Secara umum metode METT terbagi menjadi dua bagian utama yaitu bagian pertama berisi lembar data dan bagian kedua berisi lembar penilaian. Lembar data terdiri dari dua bagian yaitu lembar data satu dan lembar data dua. Lembar data satu terdiri dari status kawasan, kepegawaian, pendanaan dan tujuan pengelolaan. Lembar data dua berisi tentang ancaman-ancaman terhadap kawasan. Sedangkan lembar penilaian berisi pertanyaan-pertanyaan tentang aspek-aspek seperti pada kerangka *World Comission on Protected Areas* (WCPA) yang terdiri dari: konteks, perencanaan, input, proses, output dan outcome. Nilai paling tinggi dari seluruh pertanyaan (berjumlah 30) dan pertanyaan tambahan adalah 99. Nilai akhir dari menyelesaikan penilaian dapat dihitung sebagai persentase dari 99 atau nilai total dari seluruh pertanyaan yang relevan dengan kawasan lindung tersebut. (Sebagaimana dinyatakan diatas, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, harus dijelaskan di kolom komentar/penjelasan). Sehingga jika suatu

kawasan lindung memiliki nilai 65 dari nilai total 87, persentase dapat dihitung dengan membagi 65 dengan 87 dan dikalikan 100 (contoh: $65/87 \times 100\% = 75\%$). (KLHK KSDAE, 2015). Penjelasan ringkas tentang keenam aspek tersebut seperti pada tabel 1 berikut:

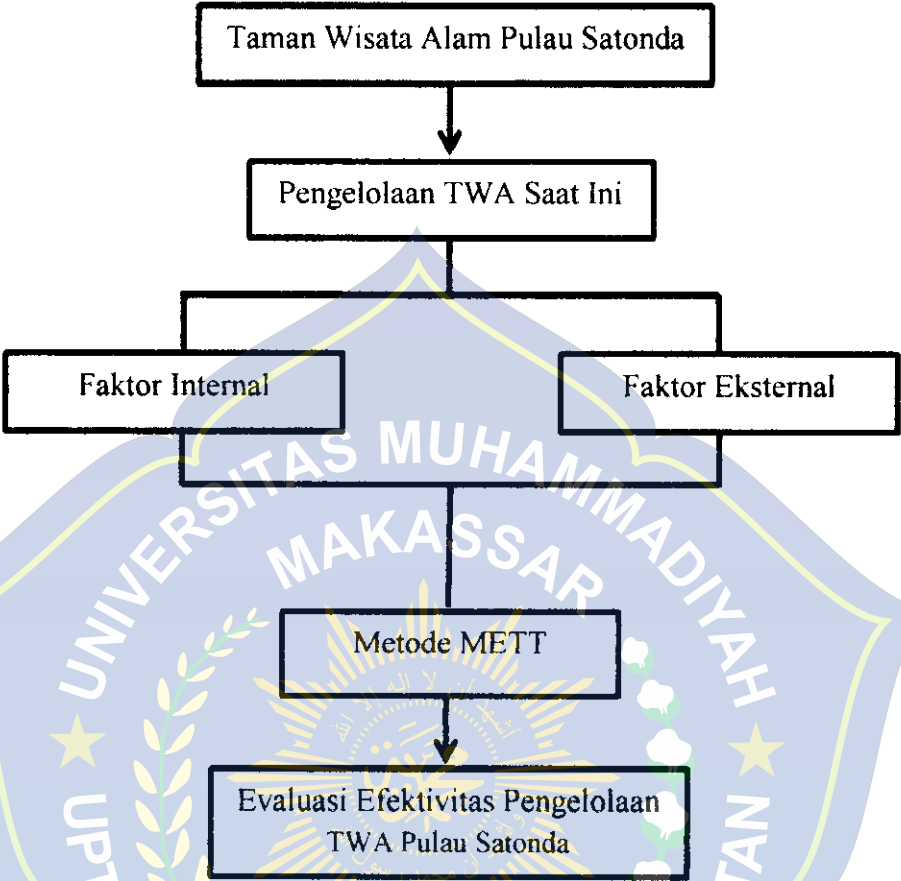
Elemen-elemen dari evaluasi	Penjelasan	Karakteria yang dinilai	Fokus dari evaluasi
Konteks	DI mana kita sekarang? Penilaian arti penting, ancaman dan iklim kebijakan	- Arti penting - Ancaman-ancaman - Kerawanan - Konteks nasional - Mitra	Status
Perencanaan	Kemana kita hendak pergi? Penilaian akan desain dan perencanaan kawasan lindung	Peraturan dan kebijakan kawasan lindung Desain dari sistem kawasan lindung Desain dari kawasan lindung Perencanaan pengelolaan	Kesesuaian
Input	Apa yang kita perlukan? Penilaian akan sumberdaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan	Pengadaan badan organisasi Pengadaan kawasan	Sumberdaya
Proses-proses	Bagaimana cara melakukannya? Penilaian akan penyelenggaraan pengelolaan	Cocoknya proses-proses pengelolaan yang digunakan	Evesiensi dan kesesuaian
Output	Apakah hasilnya? Penilaian akan implementasi program-program pengelolaan	Hasil dari tindakan-tindakan pengelolaan Jasa dan produk	Efektivitas

	dan tindakan-tindakan; penghasilan produk dan jasa		
Hasil akhir	Apa yang telah kita capai? Penilaian akan hasil akhir dan sejauh mana hasil-hasil tersebut telah mencapai tujuan utama	Dampak: efek dari kinerja pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan utama	Efektifitas dan kesesuaian

Sumber: WWF(2007)

Secara resmi Indonesia menggunakan metode METT sebagai kebijakan nasional dan menjadi salah satu indikator kinerja (KLHK, 2015). Perhitungan METT untuk kawasan konservasi perairan dilakukan menggunakan *Score Card to Achieving Management Effectiveness Goals for Marine Protected Area* yang merupakan adopsi dari METT. Pengisian kartu skor oleh responden di input dengan memindahkan skor masingmasing pertanyaan ke dalam template Microsoft Excel. Data yang diperoleh pada kartu skor dianalisis secara kuantitatif dengan meng-hitung persentase nilai untuk setiap elemen (Magfiroh, 2020).

2.6 Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-April 2021 yang terletak di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel untuk penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan dilakukan dengan menggunakan metode penarikan sampel secara sengaja (*purposive sampling*) dengan mempertimbangkan pengetahuan dan keahlian responden terhadap kondisi kawasan. Responden yang terutama dipilih yaitu Kepala Balai, Kepala Seksi Konservasi Wilayah, Kepala Resort Kawasan, Pegawai di bagian perencanaan, dan Pegawai di lapangan beserta pengunjung (sebanyak 30 orang).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner kemudian diolah secara kuantitatif dan kualitatif. Dengan metode METT (*Management Effectiveness Tracking Tools*)

3.4 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

- a. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan kuisisioner masing-masing responden, yang meliputi data identitas, efektivitas pengelolaan, factor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Satonda.

- b. Data sekunder diperoleh dari dalam area kerja Taman Wisata Alam Pulau Satonda, dan pemerintah Kabupaten Dompu.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penyusunan strategi yaitu dengan menelaah semua data- data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari hasil wawancara langsung maupun pengamatan di lapangan.

Lembar penilaian berisi pertanyaan-pertanyaan tentang aspek-aspek seperti pada kerangka *World Commission on Protected Areas* (WCPA) yang terdiri dari: konteks, perencanaan, input, proses, output dan outcome. Nilai paling tinggi dari seluruh pertanyaan (berjumlah 30) dan pertanyaan tambahan adalah 99. Nilai akhir dari menyelesaikan penilaian dapat dihitung sebagai persentase dari 99 atau nilai total dari seluruh pertanyaan yang relevan dengan kawasan lindung tersebut. (Sebagaimana dinyatakan diatas, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, harus dijelaskan di kolom komentar/penjelasan). Sehingga jika suatu kawasan lindung memiliki nilai 65 dari nilai total 87, persentase dapat dihitung dengan membagi 65 dengan 87 dan dikalikan 100 (contoh: $65/87 \times 100\% = 75\%$). Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode METT didapat hasil bervariasi dari sembilan kawasan hutan yang sebelumnya pernah di nilai. Nilai paling rendah sebesar 58% dari yang paling tinggi sebesar 79%.

Penjelasan ringkas tentang keenam aspek tersebut seperti pada tabel 2 berikut:

Elemen–elemen dari evaluasi	Penjelasan	Karakteria yang dinilai	Fokus dari evaluasi
Konteks	DI mana kita sekarang? Penilaian arti penting, ancaman dan iklim kebijakan	- Arti penting - Ancaman–ancaman - Kerawanan - Konteks nasional - Mitra	Status
Perencanaan	Kemana kita kehendak pergi? Penilaian akan desain dan perencanaan kawasan lindung	Peraturan dan kebijakan kawasan lindung Desain dari sistem kawasan lindung Desain dari kawasan lindung Perencanaan pengelolaan	Kesesuaian
Input	Apa yang kita perlukan? Penilaian akan sumberdaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan	Pengadaan badan organisasi Pengadaan kawasan	Sumberdaya
Proses-proses	Bagaimana cara melakukannya? Penilaian akan penyelenggaraan pengelolaan	Cocoknya proses-proses pengelolaan yang digunakan	Evesiensi dan kesesuaian
Output	Apakah hasilnya? Penilaian akan implementasi program-program pengelolaan dan tindakan-tindakan; penghasilan produk dan jasa	Hasil dari tindakan-tindakan pengelolaan Jasa dan produk	Efektivitas

Hasil akhir	Apa yang telah kita capai? Penilaian akan hasil akhir dan sejauh mana hasil-hasil tersebut telah mencapai tujuan utama	Dampak: efek dari kinerja pengelolaan dalam rangka mencapai tujuan utama	Efektifitas dan kesesuaian
--------------------	--	--	----------------------------

Sumber: WWF(2007)

Dari hasil data-data tersebut kemudian diolah menggunakan metode analisis data yaitu dengan metode METT dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Nilai akhir} - \text{Total skor}}{\text{Nilai maksimum}} \times 100\% \dots\dots\dots ?$$

Kategori tingkat efektivitas dapat ditentukan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kategori Tingkat Efektivitas

Tingkat Efektivitas	Kategori
0% - 33,9%	Kurang efektif
34% - 66,9%	Cukup efektif
67% - 100%	Efektif

Sumber: Data Primer setelah Diolah

3.6 Definisi Operasional

1. Taman Wisata Alam adalah kegiatan rekreasi untuk menikmati keindahan yang masih alami.
2. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan suatu tempat.

3. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang mendukung taman wisata alam Pulau Satonda untuk bisa dikembangkan sehingga memaksimalkan potensi dan mengurangi kelemahan.
4. Faktor eksternal yaitu faktor yang bisa memberikan peluang dan ancaman terhadap taman wisata alam Pulau Satonda.



IV. KEADAAN UMUM LOKASI

4.1 Gambaran Umum Taman Wisata Alam Pulau Satonda

Berdasar Surat Keputusan. Mentri Kehutanan Nomor : 22/Kpts-VI/1998 tanggal 7 Januari 1998, Pulau Satonda dan Perairan disekitarnya seluas 2.600 Ha terdiri dari daratan (453,70 Ha) dan luas perairan (2146,3 Ha). Secara administratif berada di wilayah Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dan mencakup batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut, sebelah utara dibatasi perairan satonda bagian utara, sebelah timur dibatasi Desa Labuhan Kenanga, sebelah selatan dibatasi perairan Selat Satonda dan sebelah barat dibatasi perairan Selat Belahan bagian utara. Letaknya yang strategis di jalur laut wisata Pulau Bali, Pulau Moyo dan Pulau Komodo.

Kawasan ini dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat berdasar pada peraturan Menteri Kehutanan No.P02/Menhut-II/2007, 1 Februari 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Taman Wisata Alam menawarkan adanya danau yang unik seperti lingkungan pulau, pantai berpasir dan laut dengan terumbu karang yang kaya mengelilingi Danau Pulau Satonda. Keunikan alam di Danau Pulau Satonda telah menarik banyak turis lokal maupun mancanegara. Terdapat berbagai potensi sumberdaya ekowisata di Danau Pulau Satonda antara lain potensi flora dan fauna, objek wisata, serta sarana dan prasarana.

1) Jenis flora dan fauna

Secara umum jenis flora dan fauna yang ada di Danau Pulau Satonda antara lain Ketapang (*Terminalia catappa*), Pandan Laut (*Pandanus tectorius*), Beringin (*Ficus sp*), Waru Laut (*Hibiscus tiliaceus*), Nyamplung (*Calophyllum inophyllum*), Mentigi (*Pemphis acidula*) dan Asam (*Tamarindus indica*). Jenis fauna antara lain Rusa (*Cervus timorensis*), Babi Hutan (*Sus scrova*), Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Porcupine (*Hystrix javanica*), Kelalawar (*Pteropus vampir*) Ayam Hutan, Pergam Hijau, Kepodang, Tekukur, dan Burung Puyuh.

2) Objek wisata

Objek wisata di Danau Pulau Satonda berupa pasir putih pantai dan pemandangan dari atas bukit, serta terumbu karang. Beberapa kegiatan wisata yang dapat dilakukan di kawasan wisata tersebut adalah snorkeling dan scuba diving dengan pemandangan berupa terumbu karang.

3) Sarana dan prasarana

Taman wisata alam Danau Pulau Satonda menyediakan beberapa sarana dan prasarana tangga menuju Danau Pulau Satonda, serta dermaga untuk persinggahan perahu atau boat sebagai fasilitas penunjang wisatawan. Fasilitas lain yang terdapat di Danau Pulau Satonda antara lain penginapan (homestay) dan warung kecil sebagai penunjang perekonomian masyarakat sekitar.

4) Aksesibilitas

Perjalanan ke Satonda atau Pulau Satonda yang terletak di Laut Flores ini, sekitar tiga kilometer dari Semenenanjung Sanggar. Koordinat posisinya, 8o 7' Lintang Selatan dan 117 o45' Bujur Timur.

Pengunjung setiap tahun didominasi oleh pengunjung asing yang datang dari Paris, Canada, Swiss dan Singapura. Sedangkan untuk pengunjung lokal didominasi dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Bandung, Bogor, Bima, Dompu, dan Sumbawa. Budaya yang masih dikembangkan sebagai potensi yang menarik perhatian pengunjung antara lain yaitu tarian musik sasando, tarian buja kadanda (tarian bersenjatakan tombak dan perisai) yang merupakan tarian yang menggambarkan dua prajurit yang sedang berperang, tarian lenggo, dan tarian wura bongi monca. Sebagian besar pengunjung atau wisatawan yang berwisata ke Danau Pulau Satonda memiliki motivasi untuk melakukan kegiatan snorkeling ataupun diving dengan objek yang paling menarik perhatian yaitu danau air asin dan pemandangan terumbu karang bawah laut.

Karakteristik masyarakat di kawasan Danau Pulau Satonda dapat dilihat dari jenis pekerjaan yang didominasi oleh petani dan wiraswasta serta tingkat pendidikan yang didominasi lulusan sekolah menengah atas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum berkembangnya kegiatan wisata di Danau Pulau Satonda, kehidupan mereka hanya bergantung dari sumber daya alam khususnya laut. Kegiatan wisata di Danau Pulau Satonda saat ini telah meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar. Mereka sangat mendukung kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi dimana masyarakat dapat ikut serta mengelolanya sebagai tempat wisata. Peluang usaha serta kerja yang dapat dilakukan masyarakat dalam rangka pengembangan ekowisata di Danau Pulau Satonda yaitu jasa transportasi, penginapan (homestay), serta restoran atau cafe. Kendala yang

dialami masyarakat adalah kemampuan berbahasa inggris, sedangkan pengunjung atau wisatawan di kawasan tersebut didominasi wisatawan mancanegara.

4.1.3 VISI & MISI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA BARAT

A. VISI

Berdasarkan Rencana Strategis Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Rencana Strategik Pemerintah Provinsi NTB serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka visi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat adalah: “Terwujudnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan di luar kawasan konservasi untuk mendukung mutu kehidupan dan kesejahteraan masyarakat”.

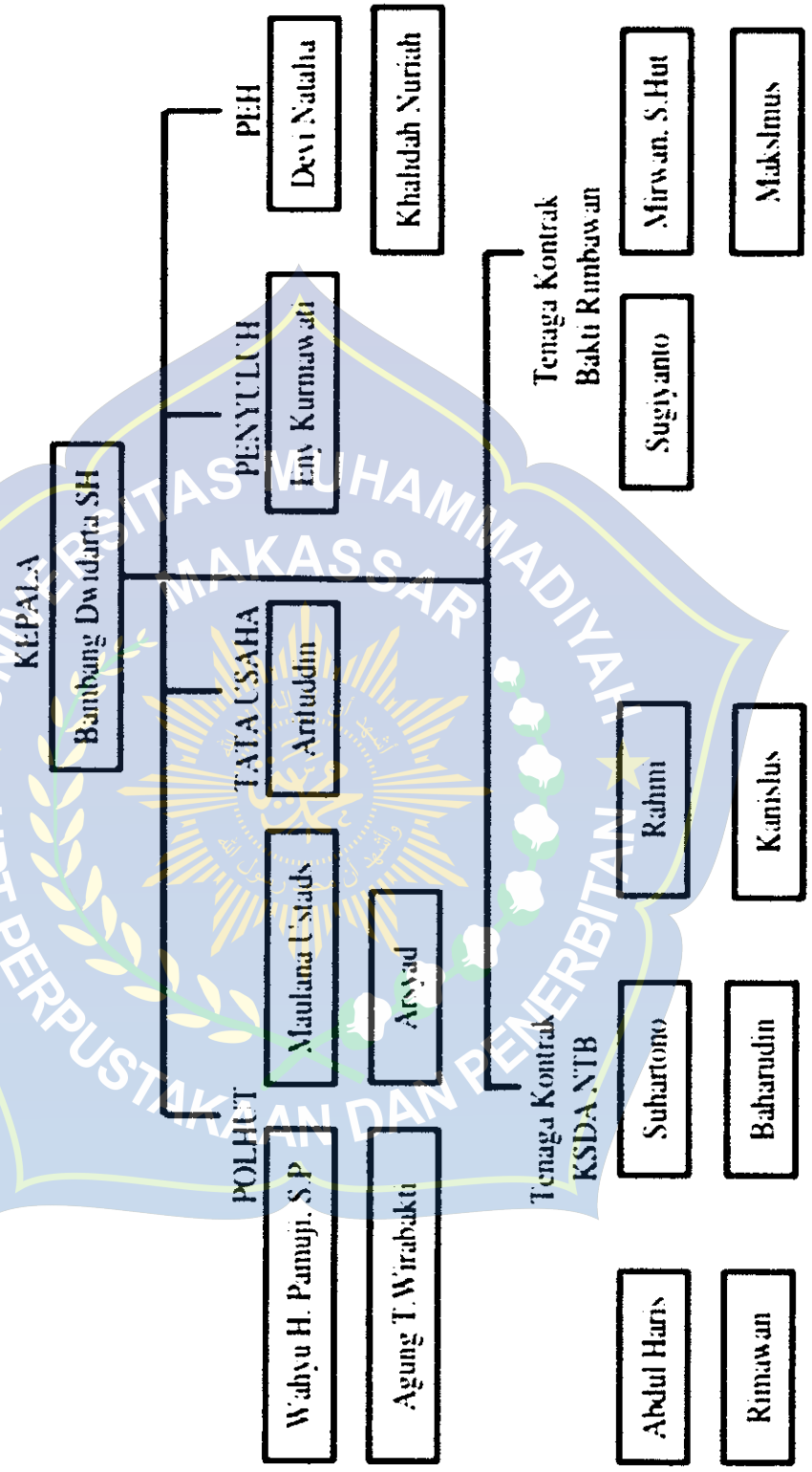
B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Balai KSDA NTB adalah :

- Memantapkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan fungsinya,
- Memantapkan perlindungan kawasan konservasi dan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,
- Meningkatkan pemanfaatan kawasan konservasi secara lestari sesuai dengan fungsinya,
- Meningkatkan kelembagaan, kemitraan dan partisipasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

4.1.4 Struktur Organisasi Balai KSDA NTB SEKSI KONSERVASI WILAYAH

III BIMA-DOMPI



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Penilaian Efektivitas Pengelolaan

Hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada lokasi Cagar Alam Sibolangit dilakukan dengan menggunakan Metode *Management Effectiveness Tracking Tools (METT)* secara umum dapat di klasifikasikan kedalam katagori efektif, cukup efektif dan kurang efektif. Data hasil perhitungan METT di Taman Wisata Alam Pulau Satonda menunjukkan bahwa penilaian efektivitas pengelolaan Taman Wisata Alam dapat dilihat dari penilaian kriteria masing-masing tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Satonda Di Desa Nanga Miro Kecamatan Pekat Kabupaten Dmpu.

Aspek	No Pertanyaan	Kriteria	Nilai skor	Nilai maks	Persentase (%)
Konteks	1	Status hukum	3	3	100%
		Sub total	3	3	
Perencanaan	2	Peraturan kawasan	3	3	100%
	4	Tujuan kawasan	3	3	
	5	Desain kawasan	3	3	
	8	Rpjp	2	3	
	21	Penggunaan lahan & air	6	6	
	7	Rencana pengelolaan	6	6	
		Sub total	23	24	
Input	3	Pengakuan hukum	3	3	95%
	9	Inventarisasi SDA	3	3	
	13	Jumlah pegawai	3	3	
	14	Pelatihan Pegawai	2	3	
	15	Anggaran	3	3	
	16	Kapasitas anggaran	3	3	
	18	Perlengkapan	3	3	
		Sub total	18	21	
Proses	6	Pengukuhan	3	3	88%
	10	Sistem perlindungan	2	3	
	11	Riset	3	3	
	12	Pengelolaan SDA	3	3	
	17	Pengelolaan anggaran	3	3	
	19	Pemeliharaan perlengkapan	3	3	
	20	Pendidikan & penyadaran	3	3	
	22	Pemerintah & swasta disekitar	0	0	
	23	Masyarakat adat	0	3	
	24	Masyarakat local	5	6	
	26	Monitoring & evaluasi	2	3	
	28	Operator wisata komersil	0	0	
	29	Pungutan	2	3	
		Sub total	31	36	
Output					94%
	27	Fasilitas pengunjung	3	3	
Outcomes		Sub total	3	3	100%
	25	Keuntungan ekonomis	2	3	
	30	Kondisi nilai nilai	6	6	
		Sub total	8	9	

5.1.1 Konteks

Berdasarkan tabel 4 dan lampiran 1 yang membahas mengenai Aspek konteks dalam METT hanya mencakup status hukum. Berdasar Surat Keputusan. Menteri Kehutanan Nomor : 22/Kpts-VI/1998 tanggal 7 Januari 1998, Pulau Satonda dan Perairan disekitarnya seluas 2.600 Ha terdiri dari daratan (453,70 Ha) dan luas perairan (2146,3 Ha). Secara administratif berada di wilayah Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat dan mencakup batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut, sebelah utara dibatasi perairan satonda bagian utara, sebelah timur dibatasi Desa Labuhan Kenanga, sebelah selatan dibatasi perairan Selat Satonda dan sebelah barat dibatasi perairan Selat Belahan bagian utara. Letaknya yang strategis di jalur laut wisata Pulau Bali, Pulau Moyo dan Pulau Komodo. Nilai aspek konteks memiliki nilai 3 dengan persentase maksimal (100%). Artinya pada Kawasan konservasi telah memiliki status hukum formal tidak ada keraguan pada aspek konteks dengan rentang katagori efektif (67%-100%). Nilai skor METT pada aspek konteks adalah 3. sedangkan nilai maksimal METT adalah 3.

Seluruh Kawasan Konservasi di Indonesia telah memiliki status hukum formal, baik itu penunjukan parsial melalui SK Menhut/Menhutbun/Mentan/ Gubernur Jenderal Hindia Belanda (staatsblat).

5.1.2 Perencanaan

Dari hasil penilaian pada tabel 4 dapat di tentkan Persentase aspek perencanaan (95%) dan nilai skor METT yang didapat adalah 23 dari skor maksimal yaitu 24. Sedangkan kriteria yang terdapat dalam aspek perencanaan yaitu tujuan kawasan, peraturan kawasan, desain kawasan, rencana pengelolaan jangka panjang (RPJP), rencana pengelolaan jangka pendek (RPJPn) dan penggunaan lahan dan air.

Aspek perencanaan terdapat nilai kriteria terendah yaitu Rencana pengelolaan jangka pendek (RPJPn) dengan skor 2 kerana Rencana pengeloalaan jangka pendek (RPJPn) sebagian besar kegiatannya telah diimplementasikan dan nilai tertinggi terdapat pada tujuan kawasan dan Rencana pengelolaan jangka panjang (RPJP) dengan nilai skor 6 karena di sertai dengan 3 pertanyaan tambahan dengan masing-masing nilai skor 1. Artinya kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan pengelola yang telah disepakati dan tengah di implementasikan sesuai dengan tujuan utama di bentuk Kawasan Konservasi .

Kawasan konservasi Taman Wisata Alam Pulau Satonda memiliki perencanaan yang matang dan sudah menjalin kerja sama dengan pihak perusahaan swasta yang terjalin sejak tahun 2011. Artinya pada peraturan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Pulau Satonda sudah memiliki rancangan awal terkait pengelolaan Kawasan berdasarkan surat keputusan terbaru 2018 SK.450/KSDAE/SET/KSA.1/12/2018. Dikarenakan kawasan konservasi sepenuhnya memiliki perencanaan yang efektif dengan rincian katagori efektif (67% -100%)

5.1.3 Masukan (Input)

Persentase aspek masukan (85%). Artinya kawasan konservasi Taman Wisata Alam Pulau Satonda sudah memiliki kapasitas sumber daya yang efektif dengan katagori (67% -100%). Nilai skor yang didapat 18 sedangkan nilai maksimal METT adalah 21. Aspek masukan (*Input*) mencakup penegakan hukum, inventarisasi sumber daya alam, jumlah pegawai, staff terlatih, anggaran, kepastian anggaran dan perlengkapan.

Nilai yang terendah terdapat pada kriteria pelatihan pegawai dan anggaran dengan nilai skor 2. Artinya pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Pulau Satonda masih perlu menambahkan pegawai yang sudah terlatih. Pengelola kawasan konservasi Taman Wisata Alam Pulau Satonda masih memiliki jumlah dan tingkat keahlian staff yang masih kurang. Mengenai anggaran tersedia sudah mencukupi tetapi perlu adanya penambahan anggaran agar lebih meningkatkan efektivitas pengeleloaan, sedangkan jumlah pegawai dengan nilai 2. Artinya pegawai cukup dalam fungsi dan jumlah tetapi perlu adanya peningkatan jumlah pegawai agar pengelolaan lebih efektif dan efisien. Saat ini jumlah pegawai yang mengelola Taman Wisata Alam Pulau Satonda sebanyak 4 orang pegawai (2 orang Polhut dan 2 orang tenaga kontrak). Maka saat ini jumlah pegawai sudah mencukupi untuk tugas dan fungsinya masing-masing (BKSDA, 2011).

5.1.4 Proses (*Process*)

Aspek proses yang perlu dinilai mencakup pengukuhan, sistem perlindungan, riset, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan anggaran, pemeliharaan perlengkapan, pendidikan dan penyadaran, pemerintah dan swasta, masyarakat adat/tradisional, operator wisata, monitoring dan pungutan. Penilaian aspek proses yang perlu dilihat bagaimana manajemen pengelolaan kawasan konservasi di Taman Wisata Alam Pulau Satonda dapat berjalan dengan efektif, cukup efektif atau kurang efektif.

Persentase aspek proses (94%). Komponen proses dalam pengelolaan kawasan konservasi diatas adalah efektif dalam menunjang tercapainya tujuan-tujuan pengelolaan. Kawasan konservasi ini dilihat dari nilai yang didapat dalam kriteria penilaian dimana nilai total dari proses pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Satonda mendapatkan nilai 31 dari nilai maksimal METT yaitu 36.

Nilai skor pada aspek proses yang terendah mencakup sistem perlindungan, pengelolaan SDA, pengelolaan anggaran, serta pemerintah dan swasta disekitar kawasan. Dengan nilai skor paling rendah yaitu sistem perlindungan, Monitoring & evaluasi, dan pungutan dengan nilai skor 2.

Masyarakat lokal memiliki skor tertinggi yaitu 5 sangat baik karena disertai dengan 3 pertanyaan tambahan yang memiliki nilai skor masing-masing 1. Hal ini di karenakan masyarakat lokal adalah kunci utama dari tujuan terbentuknya Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan Kawasan Konservasi dengan tujuan memberikan hukum atas status, fungsi letak batas. Maka dapat

dilihat pengukuhan Batas kawasan konservasi sudah diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk lokal atau pengguna lahan yang bertetangga dan dikukuhkan dengan tepat. Sedangkan nilai sedang dalam aspek ini meliputi riset, pengelolaan SDA, pengelolaan anggaran, pemeliharaan perlengkapan, pendidikan dan penyadaran dengan nilai skor 3. Artinya pengelolaan yang dilakukan sudah jelas dan telah memenuhi standar sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi untuk kedepannya perlu adanya peningkatan. Adapun kekuatan dalam aspek proses meliputi kegiatan pengelolaan sumber daya, anggaran, pendidikan dan pengetahuan, masyarakat lokal, serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan dengan baik.

5.1.5 Pengeluaran (Output)

Aspek pengeluaran (output) mendapatkan nilai persentase 100% dengan rentang kategori (66,9%-100%) adalah efektif.

Kawasan konservasi Taman Wisata Alam Pulau Satonda memiliki fasilitas dan kegiatan yang dapat dilihat di Tabel 5.

Tabel 5. Fasilitas dan aktivitas kegiatan di Taman Wisata Alam Pulau Satonda.

No	Fasilitas di kawasan TWA Pulau Satonda	Kegiatan rutin di kawasan
1.	Warung kecil	-Penangkaran penyu
2.	Penginapan	-Kerja sama dengan mitra
3.	Jalan pendakian	-Mengontrol dan mensurvei
4.	Tempat berteduh / Canopy	-patroli
5.	Tempat berkemah	-penanaman terumbu karang
6.	Dermaga	

Sumber: Data Primer

Keberadaan Taman Wisata Alam Pulau Satonda harus terus di jaga dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut seperti patroli rutin yang dilakukan oleh

Polisi Hutan (POLHUT) dan satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC). Satuan ini bertugas untuk melakukan tindakan pengamanan, kegiatan Intelijen, operasi penanganan tumbuhan dan satwa liar, operasi mandiri Polhut, operasi gabungan antara aparat terkait seperti kepolisian dan TNI, serta kegiatan penanganan kasus tindak pidana kehutanan (Tipihut).

5.1.6 Hasil Akhir (Outcome)

Aspek hasil akhir dalam METT mencakup keuntungan ekonomis dan kondisi nilai-nilai yang ada pada kawasan konservasi Taman Wisata Alam Pulau Satonda memperoleh skor 8, sedangkan nilai maksimal METT adalah 9, Nilai persentase sebesar (88%) yang artinya kegiatan penelitian dan pengelolaan di Taman Wisata Alam Pulau Satonda ini memberikan keuntungan ekonomis untuk masyarakat setempat. Keuntungan lain untuk pemerintahan kawasan ini dapat dikenal oleh masyarakat lokal maupun non lokal, dan juga kondisi nilai-nilai ekologis tetap terjaga oleh pengelola maupun pengunjung sehingga kawasan lebih baik, sehingga nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya relatif utuh dan pengelolaan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

5.2 Rekapitulasi METT Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Pulau Satonda.

Cara perhitungan hasil persentase aspek dan nilai akhir terletak di lampiran 3. Nilai masing-masing aspek METT terhadap efektivitas pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Satonda secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 6.

4. Dukungan dan respon positif masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata di TWA Danau Pulau Satonda.
5. Pariwisata dijadikan sebagai aktivitas ekonomi penduduk disamping usaha perikanan dan nelayan.
6. Penduduk setempat menguasai informasi atraksi wisata yang cukup baik untuk pengembangan wisata ke depan.

b. Kelemahan

1. Paket wisata yang ditawarkan relatif mahal untuk masyarakat lokal
2. Keanekaragaman budaya masyarakat di Nangamiro belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.
3. Wisatawan belum terdistribusi ke semua objek yang ada.
4. Masyarakat belum seluruhnya menikmati hasil usaha wisata karena secara resmi masih dikelola oleh Balai KSDA.
5. Kurang siapnya masyarakat dalam melayani wisatawan yang datang dari mancanegara karena keterbatasan kemampuan dalam berbahasa inggris.
6. Partisipasi masyarakat cenderung bersifat pada perencanaan dan belum ada pelaksanaan dari pihak pengelola.
7. Untuk mempertahankan budaya dan adat masih kurang.
8. Kurang banyaknya waktu luang sehingga wisatawan tidak dapat menikmati kegiatan lainnya.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang

1. Promosi potensi wisata di Danau Pulau Satonda melalui jejaring internet.
2. Tugas pokok dinas pariwisata yaitu untuk mengelola tempat wisata.
3. Meningkatnya tren kunjungan wisatawan dari waktu ke waktu baik lokal maupun mancanegara terhadap kegiatan wisata alam sebagai wisata yang berkelanjutan.
4. Lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar Danau Pulau Satonda.
5. Wisatawan mempunyai persepsi positif terhadap upaya pengembangan ekowisata di Danau Pulau Satonda.
6. Telah terbentuknya kerjasama antara TWA Danau Pulau Satonda dengan wisata alam lain seperti Pulau Moyo.

b. Ancaman

1. Kerusakan lingkungan akibat penangkapan satwa dan penangkapan liar hasil laut.
2. Rendahnya kemampuan sumberdaya manusia lokal yang menyebabkan masuknya sumberdaya manusia dari luar daerah.

Penggunaan METT sebagai alat untuk membantu penilaian kawasan konservasi telah banyak dilakukan di dunia. Salah satu contohnya adalah penilaian efektivitas di Negara Tanzania khususnya di wilayah hutan Usambaras Timur yang terdiri dari Sembilan kawasan hutan. Berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan metode METT didapat hasil bervariasi dari Sembilan kawasan hutan tersebut. Nilai paling rendah sebesar 58% dan yang paling tinggi

sebesar 79%, pada tahun 2009 Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan menggunakan metode METT (Management Effectiveness Tracking Tools). Berdasarkan hasil METT didapat ancaman terbesar dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah kegiatan rekreasi dan wisata, vandalisme, kegiatan merusak kawasan lindung, sampah dan sampah padat, kehilangan species keystone (predator puncak, penyerbuk, dll) dan tanaman invasive /asing. Dari hasil penilaian didapat hasil sebesar 76%, yang termasuk dalam kategori efektif dalam pengelolaan. Balai Besar KSDA Jawa Timur juga pernah menggunakan metode ini dalam rangka pembinaan PEH dan Penyuluh Kehutanan pada tahun 2011. Namun demikian metode METT tersebut masih sebatas simulasi pada saat pembinaan PEH dan penyuluh. Alangkah lebih baiknya jika hasil pelatihan METT tersebut diimplementasikan di masing-masing kawasan konservasi sehingga bisa diketahui efektivitas pengelolaannya. Dengan diketahuinya efektivitas pengelolaan maka pengelola akan mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang perlu dilakukan perbaikan kedepannya sehingga pengelolaannya menjadi efektif dan efisien dan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. (KLHK KSDAE, 2015).

Peningkatan nilai efektivitas pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Satonda mengindikasikan bahwa pengelolaan yang dilakukan di Taman Wisata Alam Pulau Satonda sudah dilakukan dengan efektif. Namun perlu adanya peningkatan ini justru menjadi tantangan agar pengelola Taman Wisata Alam Pulau Satonda dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi strategi yang

diambil agar pengelolaan dapat berjalan lebih efektif.

Hasil dari penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Pulau Satonda akan menjadi bahan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang ingin membantu pengelolaan kawasan konservasi termasuk pemegang IPPA, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM, pemerintah daerah, dan pihak lainnya



VI. KESIMPLAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di menyimpulkan bahwasanya Pengelolaan kawasan konservasi pada lokasi Taman Wisata Alam Pulau Satonda dilakukan dengan metode *Management Effectiveness Tracking Tools* (METT) dapat dikatakan sangat berhasil karena telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk tingkat efektivitas pengelolaan yang ada di Indonesia dengan nilai presentasi 89% yang termasuk dalam kategori efektif (67%-100%) .

6.2 SARAN

Di butuhkan penambahan pegawai agar lebih menunjang eksistensi, evektivitas dan evisiensi pengelolaan taman wisata alam pulau satonda

DAFTAR PUSTAKA

- Adia Yuniarti. 2011 : *Mengenal peran dan fungsi hutan konservasi. Karya ilmiah tidak dipublikasikan*, Institut Pertanian Bogor. Yang di kutip dari Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Arief. (2001). *Hutan dan Kehutanan*. Jakarta: Kanisius.
- Arikunto, S., Jabar, & Abdul, 2010 : *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Artika NM, 2020 : *Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Karimunjawa*. IPB. Bogor
- Ananda RS, 2019. *Taman Wisata Alam: Pengertian, Fungsi, Manfaat, dan Peraturan*. Dalam halaman resmi Foresteract.com media kehutanan dan lingkungan hidup <https://foresteract.com/taman-wisata-alam/> [27 januari 2021]
- Balai KSDA NTB, 2016 : *Taman Wisata Alam Pulau Satonda, Pekat Kabupaten Dompu*. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat (Balai KSDA NTB) Jl. Majapahit No.54B Mataram
- Dimiyati dan Mudjiono. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineke Cipta Joko Suwandi
- Fandeli, 2005. *Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional*. UGM. Yogyakarta
- Jaya Indra, 2017. *Annalisis strategi pengembangan Taman Wisata Alam Madapangga di Desa Ndano Kecamatan Madapangga Kabupaten BimaBusiness* Dari buku Policy and Strategy Management. Singapore: McGraw Hill, 1988. UNISMUH Makassar.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KSDAE, 2015. *Pedoman penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konsevasi di Indonesia Management Effectiveness Tracking Tools*. Buku panduan METT 2015
- Rimbakita.com, 2019 : *Taman Wisata Alam Pengertian, Fungsi, Pengelolaan & 115 Daftar di Seluruh Indonesia*. <https://rimbakita.com/taman-wisata-alam/> [1 desember 2020]
- Pasal 1 angka 2 UU No.5 Th. 1990 : *konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya*. Dalam Undang - Undang Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2013. : *STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI BEKANTAN (NASALIS LARVARTUS WURMB) TAHUN 2013-2022*

Suyitno, 2001 : *perencanaan wisata*. Yogyakarta; Kanisius.



Lampiran 1. kuisisioner Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
1. Status Hukum Apakah kawasan konservasi ini memiliki status hukum? Context	Kawasan Konservasi ini tidak pernah ditetapkan secara hukum	Tidak ada KK seperti ini di Indonesia	0		
	Ada kesepakatan bahwa kawasan konservasi tersebut harus ditegaskan secara umum tetapi prosesnya belum dimulai	Tidak ada KK seperti ini di Indonesia	1		
	Kawasan konservasi tersebut dalam proses penetapan status hukum tetapi prosesnya belum selesai (termasuk situs yang ditetapkan dalam konvensi internasional, seperti Ramsar, atau hukum lokal/tradisional seperti kawasan konservasi masyarakat, yang belum memiliki status hukum atau perjanjian nasional)	Tidak ada KK seperti ini di Indonesia	2		
	Kawasan konservasi tersebut telah memiliki status hukum formal	Seluruh KK di Indonesia telah memiliki status hukum formal, baik itu penunjukan parsial melalui SK Menhut/Menhutbun/Mentan/Gubernur Jenderal Hindia Belanda (staatsblat) ataupun SK Penunjukan Provinsi.	3		
Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
2. Peraturan kawasan konservasi Apakah ada peraturan yang memadai untuk mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan Planning	Tidak ada peraturan yang mengatur penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi	Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan di KK. Sehingga tidak mungkin di 0	0		
	Ada beberapa peraturan yang mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan-kekurangan besar	Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan di KK. Sehingga tidak mungkin di 1	1		
	Ada peraturan yang mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada beberapa kelemahan atau gap	Apabila penataan Zonasi atau blok pengelolaan belum disahkan	2		
	Terdapat peraturan untuk mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan yang tidak sesuai didalam kawasan konservasi dan memberikan dasar yang sangat baik bagi pengelolaan	Apabila Penataan kawasan (zonasi/blok) telah disahkan.	3		
Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
3. Penegakan hukum Dapatkah pegawai (cth. mereka yang bertanggung jawab mengelola situs) menegakkan peraturan kawasan konservasi dengan cukup baik? Input	Pegawai tidak memiliki kapasitas/sumberdaya yang efektif untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi	Tidak terdapat staf/Polhut/PPNS Resort yang khusus mengurus kawasan	0		
	Terdapat kekurangan besar dalam kapasitas/sumberdaya pegawai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi (cth. kekurangan kemampuan, tidak ada anggaran patroli, kurang dukungan kelembagaan)	- Terdapat staf/Polhut/PPNS, namun anggaran patroli tidak tersedia - Tidak terdapat prosedur yang jelas dalam penegakan hukum di lembaga pengelola	1		
	Pegawai memiliki kapasitas/sumberdaya yang memadai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan	- Terdapat staf/Polhut/PPNS. Anggaran patroli tersedia namun belum secara spesifik menegaskan untuk patroli di kawasan yang dikelola. - Penegakan hukum dimaksud tidak selalu untuk yustisi, namun juga termasuk di dalamnya kegiatan sosialisasi peraturan.	2		
	Pegawai memiliki kapasitas/sumberdaya yang sangat baik untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi	- Terdapat staf/Polhut/PPNS beserta anggaran patrolinya/pendukung lainnya. - Terdapat prosedur yang jelas dalam penegakan hukum di lembaga pengelola	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
4. Tujuan utama dari kawasan konservasi Apakah pengelolaan dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati? <i>Planning</i>	Belum ada tujuan yang disepakati untuk kawasan konservasi ini	Belum menyusun Rencana Pengelolaan (RP) yang memuat tujuan pengelolaan	0		
	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati, tetapi tidak dikelola sesuai tujuan-tujuan ini	Rencana Pengelolaan (RP) sudah disusun dan memuat tujuan pengelolaan secara spesifik, namun kegiatan tidak mengacu pada RP	1		
	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati, tetapi pengelolaan yang dilakukan hanya memenuhi beberapa tujuan tersebut	kegiatan esensial sesuai tujuan pengelolaan yang direncanakan dalam RP sebagian telah dilaksanakan	2		
	Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati dan pengelolaan telah memenuhi semua tujuan tersebut	Semua kegiatan esensial untuk mencapai tujuan pengelolaan dalam RP telah dilakukan	3		
Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
5. Desain kawasan konservasi Apakah kawasan konservasi memiliki luasan dan bentuk yang tepat untuk melindungi spesies, habitat, proses-proses ekologis dan tangkapan air sesuai kepentingan konservasi kuncinya? <i>Planning</i>	Desain kawasan konservasi yang tidak memadai berarti pencapaian tujuan utama kawasan konservasi yang sangat sulit	Kawasan tidak memadai dari sisi luas; bentuk; dan lokasi untuk upaya konservasi tujuan pengelolaan.	0		
	Desain kawasan konservasi yang tidak memadai berarti pencapaian tujuan utama yang sulit tetapi beberapa kegiatan mitigasi tengah dilakukan (cth perjanjian dengan pemilik lahan yang bertetangga untuk koridor satwa atau pengenalan manajemen DAS yang sesuai)	- Kawasan tidak memadai namun ada upaya membangun kesepakatan dengan pemangku lahan sekitarnya untuk konservasi tujuan pengelolaan - Sebagai contoh perjanjian dengan pemilik lahan yang bertetangga untuk koridor satwa atau pengenalan manajemen DAS yang sesuai	1		
	Desain kawasan konservasi tidak signifikan menghalangi pencapaian tujuan, tetapi perlu ditingkatkan (cth. terkait dengan proses-proses ekologis skala besar yang terjadi)	Desain kawasan relatif memadai namun perlu ditingkatkan antara lain melalui upaya konektivitas dengan kawasan konservasi lain; adanya areal penyangga yang merupakan perluasan habitat yang ada, dll	2		
	Desain kawasan konservasi membantu pencapaian tujuannya; desain memadai untuk konservasi spesies dan habitat; dan menjaga proses-proses ekologis seperti aliran permukaan dan bawah tanah pada skala DAS, pola gangguan alam, dll	Kawasan memadai baik secara luas, lokasi dan bentuknya sehingga tidak menghalangi pencapaian tujuan	3		
Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
6. Pengukuhan (demarkasi) batas kawasan konservasi Apakah batas kawasan diketahui dan dikukuhkan? <i>Process</i>	Batas kawasan konservasi tidak diketahui oleh otoritas pengelolaan atau penduduk setempat/pengguna lahan yang bertetangga	Petugas dan masyarakat tidak mengetahui batas kawasan	0		
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan tetapi tidak diketahui oleh penduduk setempat/pengguna lahan yang bertetangga	Hanya petugas yang mengetahui batas kawasan	1		
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk lokal/pengguna lahan yang bertetangga tetapi tidak dikukuhkan dengan tepat	Petugas dan masyarakat mengetahui batas kawasan namun tidak tepat (tidak sesuai antara di peta dan di lapangan atau sebagian kawasan belum diterima oleh masyarakat)	2		
	Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk lokal/pengguna lahan yang bertetangga dan di kukuhkan dengan tepat	Tata batas sudah temugelang dan terdapat BA Tata Batas yang ditanda tangani para pihak. Dibuktikan dengan tidak adanya komplain terkait pal batas	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
7. Rencana pengelolaan Apakah ada rencana pengelolaan dan apakah rencana tersebut tengah diimplementasikan? <i>Planning</i>	Tidak ada rencana pengelolaan untuk Kawasan Konservasi ini	RP belum disusun	0		
	Rencana pengelolaan tengah disiapkan atau telah disiapkan tetapi belum diimplementasikan	Cukup jelas	1		
	Rencana pengelolaan telah ada tetapi baru sebagian yang diimplementasikan karena kendala pendanaan atau masalah lain	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RP) telah disahkan dan sebagian kegiatan penting telah dilakukan (tercantum dalam alokasi budget pengelola atau hibah)	2		
	Rencana pengelolaan telah ada dan tengah diimplementasikan	Kegiatan esensial dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RP) telah dilakukan (tercantum pada alokasi budget pengelola atau didanai melalui kerjasama (MoU) dengan pihak lain (Pemda / LSM / Universitas / swasta)	3		

Nilai tambahan: *Planning*

7a. Proses perencanaan	Proses perencanaan memberikan kesempatan yang cukup bagi perapihak untuk mempengaruhi rencana pengelolaan	Konsultasi publik terhadap RP dengan melibatkan para pihak	+1		
7b. Proses perencanaan	Terdapat jadwal dan proses review periodik dan updating rencana pengelolaan	Terdapat rencana review / evaluasi RP. Apabila RP telah disusun sesuai dengan PP Nomor 28 tahun 2011 dengan periode 10 tahun	+1		
7c. Proses perencanaan	Hasil dari monitoring, riset dan evaluasi secara rutin dimasukkan kedalam perencanaan	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RP) disusun berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) Apakah ada Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) dan apakah rencana tersebut tengah diimplementasikan? <i>Planning</i>	Tidak ada Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn)	Kawasan tidak memiliki Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn)	0		
	Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) tetapi baru beberapa kegiatan yang telah diimplementasikan	Kawasan memiliki Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) dan telah diimplementasikan sebagian	1		
	Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) dan banyak kegiatan telah diimplementasikan	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) sebagian besar telah diimplementasikan	2		
	Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) dan semua kegiatan telah diimplementasikan	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) diimplementasikan seluruhnya	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
9. Inventarisasi sumberdaya Apakah anda telah memiliki cukup informasi untuk mengelola kawasan ini? <i>Input</i>	Terdapat sedikit informasi yang tersedia tentang habitat, spesies dan nilai budaya yang kritis dalam kawasan konservasi	Belum pernah dilakukan inventarisasi potensi kawasan atau survey potensi kawasan	0		
	Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi tidak memadai untuk mendukung perencanaan dan pembuatan keputusan	Inventarisasi / survey potensi / monitoring kawasan dilakukan namun belum mengarah untuk kepada tujuan pengelolaan	1		
	Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk sebagian besar area kunci perencanaan dan pembuatan keputusan	Inventarisasi / survey potensi / monitoring kawasan dilakukan terhadap aspek-aspek fitur utama kawasan	2		
	Informasi habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk mendukung semua area perencanaan dan pengambilan keputusan	Kegiatan Inventarisasi / survey potensi / monitoring kawasan dilakukan pada semua fitur-fitur kawasan dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM)	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
10. Sistem perlindungan Apakah sistem telah memadai untuk mengendalikan akses/ penggunaan sumberdaya di dalam Kawasan Konservasi? <i>Process/ Outcome</i>	Sistem perlindungan (patroli, perijinan, dll) tidak ada atau tidak efektif mengendalikan akses/ penggunaan sumberdaya	- Tidak terdapat sistem perlindungan yang dibangun - pernah dilakukan patroli kawasan dan belum ada sistem pemanfaatan	0		
	Sistem perlindungan hanya efektif sebagian dalam mengendalikan akses/ penggunaan sumberdaya	Misal sistem baru diterapkan sebagian (hanya patroli saja namun belum ada sistem pemanfaatan)	1		
	Sistem perlindungan secara moderat efektif mengendalikan akses/ penggunaan sumberdaya	Terdapat kegiatan patroli, protap patroli dan pengurusan SIMAKSI namun hanya pada sebagian kawasan	2		
	Sistem perlindungan sebagian besar atau seluruhnya efektif dalam mengendalikan akses/ penggunaan sumberdaya	Sistem patroli, pengurusan SIMAKSI hingga kerjasama pemanfaatan HMBK sudah berjalan, terdapat protapnya. Terdapat sistem patroli yang baik dan menjangkau wilayah yang rawan.	3		
11. Riset Apakah program pengelolaan berdasarkan hasil survey atau riset? Riset dan survey mencakup kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh pengelola ataupun pihak lain. <i>Process</i>	Tidak ada survey atau riset di kawasan konservasi	Belum ada penelitian atau survey kawasan	0		
	Ada sedikit survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Penelitian masih belum variatif (objek masih homogen). Data yang dihasilkan masih berupa cuplikan-cuplikan data dan belum memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan	1		
	Ada cukup survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Penelitian sudah variatif (objek penelitian beragam/heterogen). Ada database namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan	2		
	Ada program survey dan riset yang komprehensif dan terintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan	Terdapat roadmap atau research need untuk kawasan (kebutuhan kawasan, kebutuhan penelitian tertuang dalam RP) - Ada database dan pemutakhiran data	3		
Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
12. Pengelolaan sumberdaya Apakah pengelolaan sumberdaya yang intensif tengah dilakukan? <i>Process</i>	Pengelolaan sumberdaya tidak dilakukan	- Kawasan tidak/ belum dikelola - Hanya ada aktifitas pengamanan	0		
	Sangat sedikit kegiatan pengelolaan intensif terkait habitat, spesies dan proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis yang sedang dilakukan.	- Pengelolaan terhadap fitur utama masih minimal - Kegiatan terkait tujuan pengelolaan sangat terbatas	1		
	Banyak kegiatan pengelolaan intensif terkait habitat, spesies, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis sedang dilakukan tetapi beberapa isu kunci belum diperhatikan	- Pengelolaan terhadap fitur utama kawasan sudah dilakukan, tetapi belum mencakup penyelesaian permasalahan terhadap fitur utama - Kegiatan terkait tujuan pengelolaan telah dilakukan,	2		
	Kegiatan pengelolaan intensif terkait habitat, spesies, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis secara substansial atau sepenuhnya tengah/ sedang dilaksanakan	Pengelolaan terhadap fitur utama dan fitur kawasan lainnya sudah dilakukan termasuk upaya mengatasi permasalahan untuk mencapai tujuan pengelolaan	3		
Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
13. Jumlah pegawai Apakah sudah ada cukup pegawai untuk mengelola Kawasan Konservasi <i>Inputs</i>	Tidak ada pegawai	- Pegawai yang dimaksud adalah yang bertugas di kawasan yang dinilai. - Untuk UPT BKSDA adalah petugas resort	0		
	Jumlah pegawai tidak mencukupi untuk kegiatan pengelolaan yang penting	Pegawai belum cukup, baik jumlah dan fungsi (Pengelolaan yang penting: tenaga administrasi dan teknis)	1		
	Jumlah pegawai dibawah tingkat optimum untuk kegiatan pengelolaan kritis	Pegawai cukup secara fungsi (tenaga administrasi dan teknis) namun jumlahnya kurang	2		
	Jumlah pegawai sudah mencukupi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Pegawai cukup secara fungsi dan jumlah	3		
14. Staf terlatih Apakah pegawai cukup terlatih untuk	Pegawai kurang memiliki keahlian yang diperlukan untuk pengelolaan kawasan konservasi	Tidak ada staff/ petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan	0		
	Staf terlatih dan keahlian relatif rendah untuk kebutuhan kawasan konservasi	Jumlah dan tingkat keahlian staf kurang dan belum sesuai dengan tujuan pengelolaan	1		

memenuhi tujuan pengelolaan?	Staf terlatih dan keahlian memadai, tetapi perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai tujuan pengelolaan	Jumlah dan tingkat keahlian staf memadai namun perlu ditingkatkan sesuai tujuan pengelolaan	2		
Inputs/Process	Staf terlatih dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi. Staf terlatih dan keahliannya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Keahlian staf beragam dari mulai administrasi perkantoran hingga teknis sesuai tujuan pengelolaan. Identifikasi kupu-kupu	3		
Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
15. Anggaran saat ini	Tidak ada anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi	Sudah jelas	0		
Apakah anggaran saat ini sudah mencukupi?	Anggaran yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan pengelolaan dan menimbulkan kendala serius dalam kapasitas untuk mengelola	Sudah jelas	1		
Inputs	Anggaran yang tersedia mencukupi tetapi perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai pengelolaan yang efektif	Sudah jelas	2		
	Anggaran yang tersedia mencukupi dan memenuhi seluruh kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi	Sudah jelas	3		
16. Kepastian anggaran	Tidak ada kepastian anggaran untuk kawasan konservasi dan pengelolaan sepenuhnya tergantung pada pihak luar atau pendanaan sangat tidak pasti	Tidak ada anggaran spesifik untuk pengelolaan kawasan	0		
Apakah ada kepastian anggaran?	Ada sedikit kepastian anggaran dan kawasan konservasi tidak dapat berfungsi secara memadai tanpa bantuan dana pihak luar	Hanya ada alokasi anggaran pengamanan untuk kawasan	1		
Inputs	Ada cukup kepastian anggaran inti (core budget) untuk kegiatan regular kawasan konservasi tetapi banyak inovasi dan inisiatif yang tergantung pendanaan dari luar	Terdapat alokasi anggaran pengelolaan untuk kawasan, (APBN maupun non APBN)	2		
	Ada kepastian anggaran untuk Kawasan Konservasi dan pemenuhan pengelolaan	Ada alokasi anggaran (APBN/non APBN) yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan sesuai tujuan	3		
Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
17. Pengelolaan anggaran	Pengelolaan anggaran tidak baik dan secara signifikan mengurangi Efektivitas pengelolaan	Misalnya, anggaran yang turunterlambat pada tahun berjalan	0		
Apakah anggaran dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan yang penting?	Pengelolaan anggaran kurang baik dan mengurangi Efektivitas	Anggaran tidak membiayai kegiatan pengelolaan prioritas	1		
	Pengelolaan anggaran sudah memadai tetapi perlu ditingkatkan	anggaran yang ada digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan tujuan pengelolaan	2		
Process	Pengelolaan anggaran sangat baik dan memenuhi kebutuhan pengelolaan	Anggaran sesuai dengan rencana kegiatan pada RP	3		
18. Perlengkapan	Terdapat sedikit atau tidak ada perlengkapan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan	Tidak ada perlengkapan	0		
Apakah perlengkapan yang ada telah memenuhi kebutuhan pengelolaan?	Terdapat beberapa perlengkapan dan fasilitas tetapi tidak memadai untuk sebagian besar kebutuhan pengelolaan	Terdapat perlengkapan namun masih sangat kurang untuk pengelolaan	1		
Input	Terdapat perlengkapan dan fasilitas tetapi masih ada kekurangan yang menghambat pengelolaan	Perlengkapan yang ada belum sepenuhnya memadai/ minimal untuk mendukung pencapaian tujuan pengelolaan	2		
	Perlengkapan dan fasilitas yang ada telah memadai	Terdapat perlengkapan (perlengkapan lapangan, mobilisasi, fasilitas pelayanan, bangunan pengelola) yang memadai untuk mendukung pengelolaan - pengecualian untuk kawasan dengan luasan kecil (< 10 hektar), sarana digabung dengan kawasan lainnya	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
19. Pemeliharaan perlengkapan Apakah perlengkapan yang ada dipelihara secara memadai? <i>Process</i>	Ada sedikit atau tidak ada pemeliharaan untuk perlengkapan dan fasilitas	Tidak ada pemeliharaan	0		
	Ada pemeliharaan yang bersifat <i>ad hoc</i> untuk perlengkapan dan fasilitas	Pemeliharaan dilakukan secara insidental	1		
	Ada pemeliharaan dasar untuk perlengkapan dan fasilitas	Pemeliharaan dilakukan pada perlengkapan dan fasilitas yang penting	2		
	Perlengkapan dan fasilitas dipelihara secara memadai	Semua perlengkapan dan fasilitas dipelihara dan berfungsi dengan baik	3		
20. Pendidikan dan penyadaran Apakah ada perencanaan program pendidikan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan? <i>Process</i>	Tidak ada program pendidikan dan penyadaran	Sudah jelas	0		
	Ada program pendidikan dan penyadaran yang terbatas dan bersifat <i>ad hoc</i>	Kegiatan tidak terprogram dan insidental	1		
	Ada program pendidikan dan penyadaran tetapi hanya sebagian memenuhi kebutuhan dan perlu ditingkatkan	Kegiatan terprogram namun dinilai kurang secara kuantitas	2		
	Terdapat program pendidikan dan penyadaran yang memadai dan sepenuhnya dilaksanakan	Terprogram dan dilaksanakan dengan cukup	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
21. Perencanaan penggunaan lahan dan air Apakah perencanaan penggunaan lahan dan air memper- timbang- Kawasan Konservasi dan membantu pencapaian tujuan Kawasan Konservasi? <i>Planning</i>	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan tidak memperhatikan kebutuhan kawasan konservasi dan kegiatan/kebijakan yang merugikan kelangsungan kawasan	- Pemanfaatan air di luar kawasan konservasi berekosistem rawa/gambut yang berlebihan dan (membuat rawa menjadi kering dan rentan kebakaran) - Pembangunan di luar yang membuat kawasan terisolasi atau tidak terkoneksi dengan KK lainnya	0		
	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan tidak memperhatikan kebutuhan kawasan konservasi , tetapi kegiatan yang ada tidak merugikan kelangsungan kawasan	RTRW kurang mendukung fungsi kawasan Contoh : pemanfaatan air di luar kawasan konservasi yang terletak di hulu .	1		
	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan sebagian memperhatikan kebutuhan jangka panjang kawasan konservasi	RTRW sebagian mendukung fungsi kawasan	2		
	Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan sepenuhnya memperhatikan kebutuhan jangka panjang kawasan konservasi	RTRW sesuai kaidah Pembangunan di sekitar kawasan telah memadukan dengan kawasan konservasi, misal menyediakan konektivitas dengan KK lain, menyediakan buffer/penyangga kawasan , pengelolaan mempertimbangkan sistem DAS yang ada dll	3		
Nilai tambahan: Perencanaan lahan dan air					
21a: Perencanaan lahan dan air untuk konservasi habitat	Perencanaan dan pengelolaan di dalam DAS atau lanskap (bentang lahan) lokasi kawasan konservasi memasukkan provisi untuk kondisi lingkungan yang memadai (cth. volume, kualitas dan waktu aliran air, tingkat polusi air, dll) untuk menjaga habitat yang relevan	Lanskap yang di dalamnya terdapat KK sudah mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang memadai untuk menjamin keberlangsungan habitat-habitat penting Contoh : kawasan di hilir , perencanaan di hulu harus mempertimbangkan potensi polusi air ke dalam kawasan	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
21b: Perencanaan lahan dan air untuk keterhubungan (konektifitas)	Pengelolaan koridor penghubung kawasan konservasi memberikan jalur bagi satwa liar menuju habitat kunci di luar kawasan konservasi (cth. memungkinkan bermigrasi antara lokasi pemijahan air tawar dan laut atau memungkinkan migrasi satwa)	Apakah koridor sebagai jalur penghubung satwa berfungsi dengan baik.	+1		
21c: Perencanaan lahan dan air untuk jasa-jasa ekosistem dan konservasi spesies	"Perencanaan menjawab kebutuhan khusus ekosistem dan/atau kebutuhan spesies tertentu pada skala ekosistem (cth. volume, kualitas dan waktu aliran air tawar untuk kelangsungan spesies tertentu, pengelolaan api untuk menjaga habitat savana, dll)"	Apakah pembangunan di sekitar kawasan konservasi, mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di dalam kawasan.	+1		
22. Pemerintah dan swasta di sekitar Apakah ada kerjasama dengan pengguna lahan dan air di sekitar? Process	Tidak ada komunikasi antara pengelola kawasan dan otoritas/pengelola lahan dan air di sekitar	Sudah jelas	0		
	Ada komunikasi antara pengelola kawasan dan otoritas/pengguna lahan dan air di sekitar tetapi hanya sedikit atau tidak ada kerjasama	Sudah jelas	1		
	Ada komunikasi antara pengelola kawasan dan otoritas/pengguna lahan dan air di sekitar, tetapi hanya ada kerjasama terbatas	Kerjasama pemanfaatan/penggunaan di kawasan	2		
	Ada komunikasi regular antara pengelola kawasan dan otoritas/pengguna lahan dan air di sekitar, dan ada kerjasama substantif dalam pengelolaan kawasan konservasi	Kerjasama antara pengelola dengan mitra disertai dengan forum penguat. Misal, terdapat forum pengelolaan seperti mitra Kutat, dll	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
23. Masyarakat adat Apakah masyarakat adat yang tinggal atau secara regular menggunakan kawasan konservasi dapat memberikan masukan dalam keputusan pengelolaan? Masyarakat adat yg dimaksud adalah masyarakat adat yang diakui keberadaannya oleh pengelola (UPT) Process	Masyarakat adat tidak dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi	Sudah jelas	0		
	Masyarakat adat dapat memberikan sedikit masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi tidak secara langsung berperan dalam pengelolaan	Masyarakat adat terlibat dalam konsultasi publik dalam penyusunan RP dan zonasi/blok	1		
	Masyarakat adat secara langsung berkontribusi terhadap beberapa pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi keterlibatan mereka perlu ditingkatkan	masyarakat adat dapat terlibat dalam penentuan sebagian arah pengelolaan, misal zonasi/blok, jenis dan arah kegiatan dalam RP, kegiatan-kegiatan dalam zona/blok tradisional.	2		
	Masyarakat adat secara langsung berpartisipasi dalam semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, cth. Co-management	Sudah jelas	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
24. Masyarakat lokal Apakah masyarakat lokal yang tinggal ada berdekatan dengan kawasan konservasi dapat memberikan masukan? <i>Process</i>	Masyarakat lokal tidak dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Masyarakat lokal dapat sedikit memberikan masukan dalam diskusi terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi tidak memiliki peran langsung dalam pengelolaan	<i>Masyarakat lokal tertibat dalam konsultasi publik dalam penyusunan RP dan zonasi / blok</i>	1		
	Masyarakat lokal secara langsung berkontribusi terhadap beberapa pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi keterlibatan mereka dapat ditingkatkan	<i>masyarakat lokal dapat tertibat dalam penentuan sebagai arah pengelolaan, misal zonasi / blok, jenis dan arah kegiatan dalam RP, kegiatan-kegiatan dalam zona / blok tradisional..</i>	2		
	Masyarakat lokal secara langsung berpartisipasi terhadap semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, cth co-manajemen	<i>sudah jelas</i>	3		
Nilai tambahan: Masyarakat lokal					
24 a. Dampak terhadap masyarakat	Terdapat komunikasi dan kepercayaan yang terbuka antara masyarakat lokal dan/atau tradisional, para pihak dan pengelola kawasan konservasi	<i>Ada forum reguler</i>	+1		
24b. Dampak terhadap masyarakat	Terdapat program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<i>Sudah jelas</i>	+1		
24c. Dampak terhadap masyarakat	Masyarakat lokal dan/atau tradisional secara aktif mendukung kawasan konservasi	<i>Terdapat peraturan daerah / peraturan desa, adat istiadat (aktif) yang mendukung kelestarian kawasan</i>	+1		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
25. Keuntungan ekonomis Apakah KK memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat lokal, cth pendapatan, pekerjaan, pembayaran jasa lingkungan? <i>Outcomes</i>	Kawasan konservasi tidak memberikan keuntungan ekonomis secara langsung bagi masyarakat lokal	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Potensi keuntungan ekonomis secara langsung sudah diketahui dan direncanakan untuk direalisasikan	<i>Pemanfaatan wisata alam atau jasa lingkungan</i>	1		
	Terdapat aliran keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal	<i>Keuntungan ekonomi pada masyarakat masih bersifat sampingan</i>	2		
	Kawasan konservasi memberikan keuntungan ekonomi utama kepada masyarakat lokal	<i>Sebagai mata pencaharian utama masyarakat lokal bergantung pada kegiatan di dalam KK</i>	3		
26. Monitoring dan evaluasi Apakah monitoring kegiatan pengelolaan mempengaruhi kinerja? <i>Planning/ Process</i>	Tidak ada monitoring dan evaluasi di kawasan konservasi	<i>Sudah jelas</i>	0		
	Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi secara ad hoc , tetapi tidak ada strategi dan/atau kumpulan hasil secara reguler	<i>Monev dilakukan secara insidental</i>	1		
	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang disepakati dan dilaksanakan tetapi hasilnya tidak memberikan umpan balik pada pengelolaan	<i>Monev dilaksanakan secara reguler</i>	2		
	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang baik, dilaksanakan dengan baik dan digunakan dalam manajemen adaptif	<i>Dilaksanakan secara reguler dan adaptif, misal sistem monitoring & evaluasi melalui METT, SMART Patrol atau RBM</i>	3		

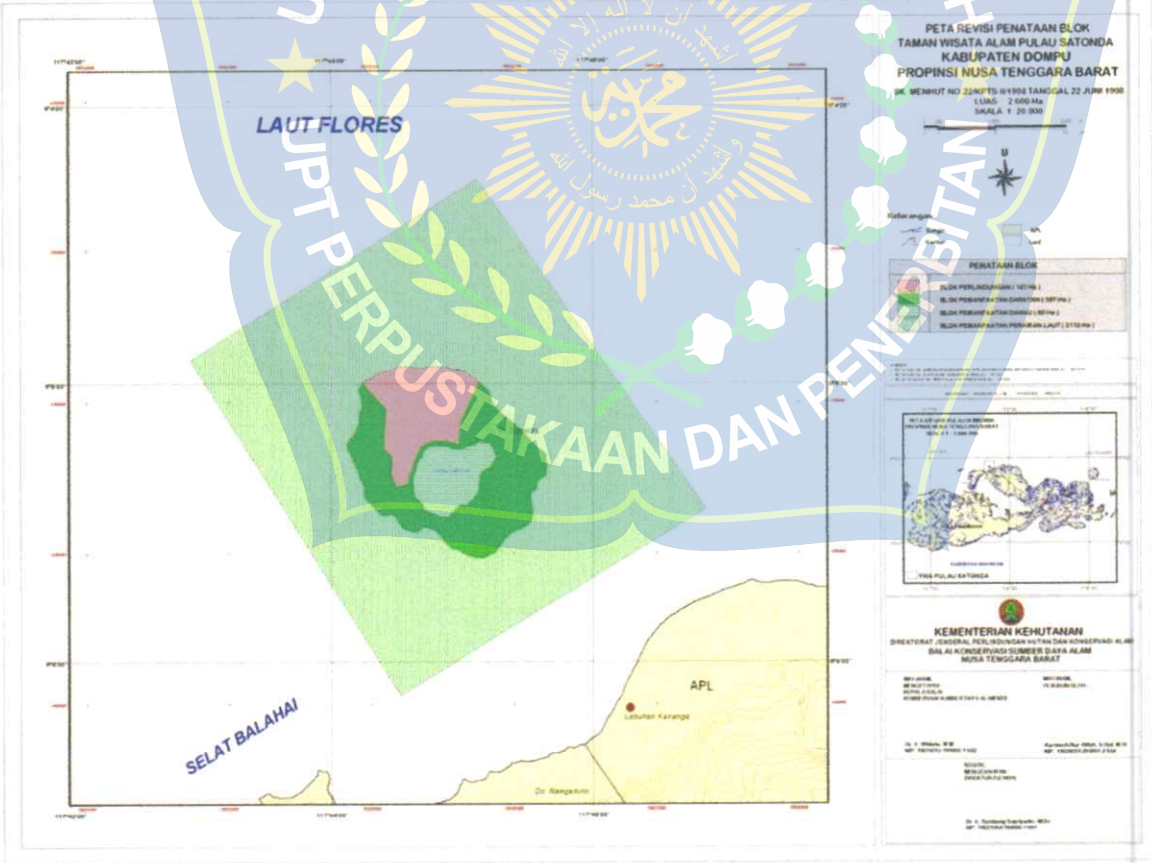
Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
27. Fasilitas pengunjung Apakah fasilitas pengunjung memadai? <i>Outputs</i>	Tidak ada fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung meskipun kebutuhannya telah teridentifikasi	Sudah jelas	0		
	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung tidak memadai untuk tingkat kunjungan saat ini	Misalnya ada papan informasi / papan penunjuk	1		
	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung cukup memadai untuk tingkat kunjungan saat ini tetapi perlu ditingkatkan	Terdapat papan informasi, papan petunjuk, gerbang dan ruang informasi	2		
	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung sangat baik untuk tingkat kunjungan saat ini	Fasilitas lengkap (sanitasi, keselamatan, aksesibilitas, informasi, kenyamanan pengunjung)	3		
Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
28. Operator wisata komersil Apakah operator wisata komersil berkontribusi pada pengelolaan kawasan konservasi? <i>Process</i>	Sedikit/tidak ada hubungan antara pengelola kawasan dengan operator wisata yang menggunakan kawasan konservasi	Sudah jelas	0		
	Terdapat hubungan antara pengelola kawasan dengan operator wisata tetapi sangat terbatas pada urusan administrasi atau peraturan	Terdapat operator luar	1		
	Terdapat kerjasama terbatas antara pengelola kawasan dengan operator wisata untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan menjaga nilai-nilai kawasan konservasi	Terdapat IUPJWA	2		
	Terdapat kerjasama yang baik antara pengelola kawasan dan operator wisata untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan menjaga nilai-nilai kawasan konservasi	Kerjasama menyangkut penambahan pengalaman/ edukasi pengunjung dalam konservasi	3		
29. Pungutan (PNBP atau pungutan lain) Jika pungutan (cth. Biaya masuk atau denda) diterapkan apakah akan membantu pengelolaan KK? <i>Inputs/Process</i>	Meskipun secara teori pungutan diterapkan, tetapi pungutan tersebut tidak dikumpulkan	PNBP tidak dipungut di wilayah yang sudah ditetapkan dalam PP No 12/2014	0		
	Pungutan dikumpulkan, tetapi tidak ada kontribusi pada Kawasan Konservasi atau lingkungan sekitarnya	Pungutan hanya PNBP	1		
	Pungutan dikumpulkan, dan memberikan sedikit kontribusi pada Kawasan Konservasi dan lingkungan sekitarnya	Ada mekanisme pungutan lain selain PNBP yang berkontribusi kepada kawasan/ lingkungan sekitarnya	2		
	Pungutan dikumpulkan dan memberikan kontribusi yang substansial untuk KK dan lingkungan sekitarnya	Belum ada mekanismenya di Indonesia	3		

Isu	Kriteria	Keterangan	Skor	Komentar/ Penjelasan	Langkah Kedepan
30. Kondisi nilai-nilai Bagaimana kondisi dari nilai-nilai penting kawasan konservasi bila dibandingkan dengan saat penunjukan kawasan? Outcomes	Banyak nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya yang penting sangat menurun/berkurang	Tujuan pengelolaan pada saat penunjukan sudah punah/turun drastis Misal: Apabila badak jawa di TNUjung Kulon punah	0		
	Beberapa nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya telah sangat menurun/berkurang	Misal: populasi badak sumatera di TNKS yang telah punah, namun masih ada fitur utama pengelolaan lain yang masih ada (harimau sumatera dll)	1		
	Beberapa nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya sebagian menurun/berkurang tetapi nilai-nilai yang paling penting tidak terkena dampak secara signifikan	Fitur-fitur kawasan berkurang, tetapi fitur utama masih ada.	2		
	Nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya relatif utuh	Sudah jelas Data berasal dari hasil monitoring. Mandat kelola utama harus ada datanya. Hasil monitoring bisa oleh mitra atau hasil riset	3		
Nilai tambahan: Kondisi nilai-nilai					
30a: Kondisi nilai-nilai	Penilaian kondisi nilai-nilai didasarkan pada riset dan/atau monitoring	Sudah jelas	+1		
30b: Kondisi nilai-nilai	Program pengelolaan yang spesifik sedang dilakukan untuk menghadapi tekanan terhadap nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya	Sudah jelas, misal: Program Penangkaran Maleo di SM Bangkiriang, Banteng di Baluran, Badak di Way Kambas, mantangan di BBS, savana di Alas Purwo.	+1		
30c: Kondisi nilai-nilai	Kegiatan untuk menjaga nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya kunci merupakan bagian yang rutin dalam pengelolaan Kawasan Konservasi	Sudah jelas, dilakukan secara rutin	+1		
TOTAL SCORE					

Lampiran 2. Peta lokasi kawasan TWA Pulau Satonda



Gambar 3 peta lokasi TWA Pulau Satonda



Lampiran 3. Dokumentasi penelitian



Gambar 5 interaksi dengan masyarakat



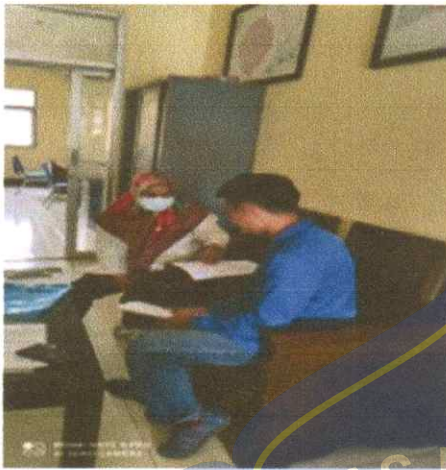
Gambar 6 wawancara dengan pihak pengelola



Gambar 6.2 wawancara dengan pihak pengelola



Gambar 6.3 wawancara dengan pihak pengelola



Gambar 6.4 wawancara dengan pihak pengelola



Gambar 7 wawancara dengan pengunjung

RIWAYAT HIDUP



M. ADIYANSYAH, lahir di Dompu pada tanggal 7 Juli 1997. Anak ketiga dari 4 bersaudara dari pasangan H.A.Hadi dengan Nurma. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di SDN No.1 Pajo pada tahun 2003-2009. Dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Pajo pada tahun 2009-2012. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Pajo pada tahun 2012-2015. Pada tahun 2015 penulis berhasil melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, penulis di terima sebagai mahasiswa di Universitas Mumammadiyah Makassar pada jurusan kehutanan Fakultas Pertanian.

Berkat rahmat Allah SWT dan doa restu yang tulus dari orang tua dan keluarga maka penulis dalam tahap penyelesaian studi dengan menyusun skripsi yang berjudul “Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Satonda di Desa Nanga Miro kecamatan Pekat Kabupaten Dompu”.